



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN
NARAPIDANA**

TESIS

**Oleh :
Diapari Sibatangkayu
NPM : 0706187483**

**PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI – FISIP
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK,
DESEMBER 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN
NARAPIDANA**

TESIS

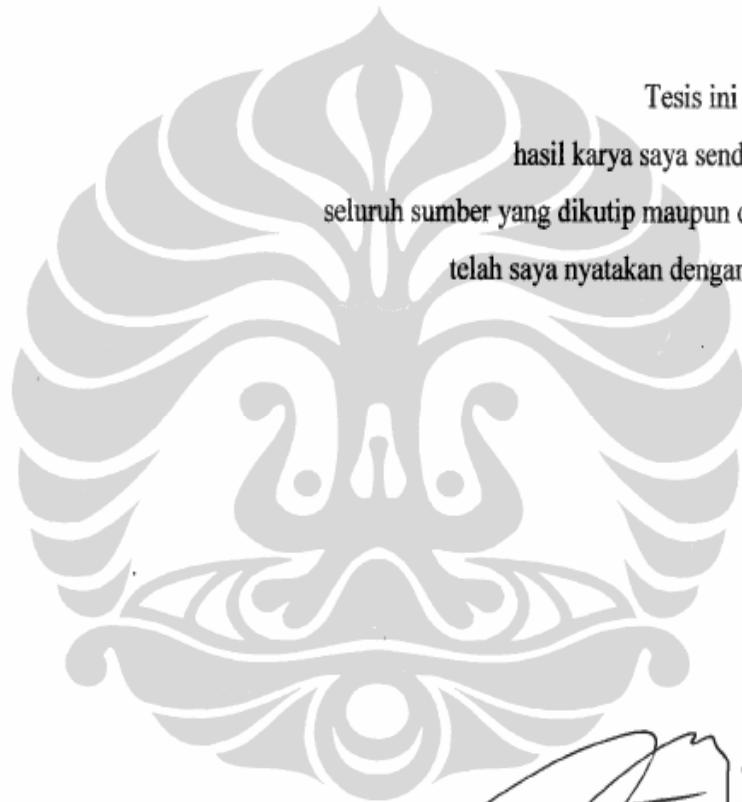
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam bidang Kriminologi**

**Oleh :
Diapari Sibatangkayu
NPM : 0706187483**

**PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI – FISIP
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK,
DESEMBER 2008**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah
hasil karya saya sendiri dan
seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar



Diapari Sibatangkayu

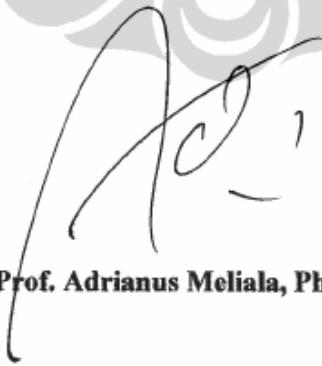
NPM : 0706187483

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Diapari Sibatangkayu
NPM : 0706187483
Program Studi : Kriminologi
Judul Tesis : Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Sebagai Alternatif Pemberdayaan Narapidana

Pembimbing :


Prof. Adrianus Meliala, Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Diapari Sibatangkayu
NPM : 0706187483
Program Studi : Kriminologi
Judul Tesis : Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Sebagai Alternatif Pemberdayaan Narapidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pascasarjana Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :

Prof. Dr. M. Mustofa, M.A.



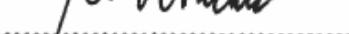
Pembimbing :

Prof. Adrianus Meliala, Ph.D.



Pengaji Ahli :

Drs. Didin Sudirman, M.Si



Sekretaris Sidang :

Herlina Permata Sari, S.Sos, M.Crim.



Depok, 19 Desember 2008

LEMBAR PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diapari Sibatangkayu
NPM : 0706187483
Program Studi : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-Exklusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI ALTERNANIF PEMBERDAYAAN NARAPIDANA

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Desember 2008
Yang Menyatakan



(Diapari Sibatangkayu)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, baik selama masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Dewan Pengaji yang terdiri dari Bapak Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (Ketua Sidang), Bapak Prof. Adrianus Meliala, Ph.D. (Pembimbing), Bapak Drs. Didin Sudirman, M.Si. (Pengaji Ahli) dan Ibu Herlina Permata Sari, S.Sos, M. Crim (Sekretaris Sidang).
3. Bapak Drs. Marten Selamet Susanto, M.E. (Pemimpin Redaksi Koran Jakarta), Bapak Agung Kurniawan, SH (Manager HRD Koran Jakarta) serta rekan-rekan sekantor yang telah memberi dorongan dan semangat serta kelonggaran waktu bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh narasumber yang tediri dari Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. Taufiq Effendi, Bapak Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc., Bapak Drs. Hasanuddin, Bc.IP, SH, MM, Bapak Drs. Habiluddin, Bc.IP., MH, Bapak Dr. Rudi Satrio Mukantardjo, SH, MH, Bapak Drs. Yohannes Sutoyo, MA, Bapak Brigjen Pol. (Prun) Soeripto, Bapak Drs. Agun Gunandjar, M.Si, Bapak Tan Kok Liong alias Anton Medan, Bapak Adi Sujatno, Bc.IP. SH, MH, Bapak Drs. Mardjaman, Bc.IP, Bapak Drs. Djimanto dan Bapak Iqrak Sulhin. S.Sos, M.Si yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara.

5. Seluruh peserta FGD yang terdiri dari Bapak Drs. Didin Sudirman, M.Si selaku fasilitator, Ibu Dra Engkuy Kurniasih, Bc.IP, Ibu Amalia Abidin Bc.IP, SH, MH, Bapak Drs. Nugroho, Bc.IP, MSi, Bapak Aman Riyadi, S.IP, SH. MSi, Bapak Suherman, Bc.IP, SH, MH, Bapak Sudarto, Bc.IP, SH, MH, Bapak Leopold Sudaryono, SH, LL.M, Bapak Syahrial Martanto W, SH, Bapak Iqrak Sulhin, S.Sos, M.Si, Bapak Marwansyah Lubis, SH, Bapak Lollong Manting, S.S, Bapak M. Ali Aranoval, SH, Bapak Gatot, SH, dan Bapak Benyamin, Bc.IP, SH, MH yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
6. Seluruh dosen Program Pascasarjana Kriminologi FISIP UI yang telah memberikan bimbingan dan menularkan ilmunya selama perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa S2 Kriminologi FISIP UI seangkatan yang selalu kompak dan selalu bersama dalam suka maupun duka.
8. Seluruh Keluarga Besar Ompu Napotar Harahap yang memberikan dukungan dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Secara khusus buat istriku tercinta Hj. Karyaningtyas yang selalu setia mendampingi dan membantu penulis dalam penyusunan tesis ini serta anak-anakku Humala Parlaungan dan Mustikasari Amalia yang selalu memberi motivasi bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalaas segala kebaikan dan kemurahan hati semua pihak yang telah memberi bantuan, dorongan maupun doanya. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi.

Depok, 30 Desember 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Diapari Sibatangkayu
Program Studi : Kriminologi
Judul : Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Sebagai Alternatif Pemberdayaan Narapidana

Sistem kepenjaraan sudah lama terkubur sejak Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH pada tahun 1963 mendeklarasikan sistem pemasyarakatan meski baru diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang 31 tahun kemudian. Bahkan setelah 13 tahun UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diimplementasikan, kondisi lembaga pemasyarakatan belum banyak berubah. Overcrowding tetap menjadi masalah serius yang belum dapat diatasi dengan alasan keterbatasan anggaran dan SDM. Overcrowding membawa dampak ikutan yang cukup panjang mulai dari tingkat pelarian yang tinggi, petugas menggunakan kekerasan, pemicu perkelahian dan kerusuhan, LP menjadi sekolah kejahatan dan sarang narkoba, stigmatisasi sampai prisonisasi. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan bukan hanya gagal namun cenderung melanggar undang-undang.

Penelitian ini mencoba mencari solusi melalui privatisasi karena penjara yang dikelola swasta di beberapa negara jauh lebih baik dibanding ketika dikelola oleh pemerintah. Metode penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis melalui observasi, studi literatur, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta melakukan Focused Group Discussion dengan praktisi dan tokoh kompeten. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kelayakan privatisasi LP di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi LP sangat layak dilakukan di Indonesia. Argumentasinya, UU No 12 Tahun 1995 sangat akomodatif dengan privatisasi dimana pada pasal (2) digariskan bahwa napi berhak aktif secara produktif dalam pembangunan bangsa dan pasal (14) secara eksplisit menegaskan seorang napi berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Agar privatisasi LP terealisasi, Ditjen Pemasyarakatan disarankan segera membentuk tim kerja dan merumuskan landasan hukumnya. Karena masih dalam rentang kendali Ditjen Pemasyarakatan, privatisasi diharapkan dapat terlaksana dalam jangka maksimal 5 tahun ke depan sehingga menjadi terobosan besar dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Ditjen Pemasyarakatan ditutntut memiliki strategi kehumasan yang andal untuk membentuk opini publik sekaligus menjadi alat penekan bagi pemerintah. Sebab, tanpa political will dari pemerintah, privatisasi LP tidak akan pernah ada di republik ini.

Kata kunci:
Privatisasi, pemasyarakatan, overcrowding

ABSTRACT

Name : Diapari Sibatangkayu
Program Study : Criminology
Title : Prison Privatization as an Alternative
Convict's Expediently

The convicts system as a prison had became very old stories since the former Minister of Judicial Affairs Dr. Sahardjo, SH declared the correction system in 1963, in spite of its ordinance 31 years later. In fact that after 13 years, UU No. 12/1995 regarding that system has been implemented, the condition of many prison not had been changed yet. Overcrowding is solemn complication that has not been overcome with some reason such as financial and human resources things. Overcrowding bring length multiplier impact for its high escaping, official violence, quarrel and chaoticity, prison became school of crime and drugs web, stigmatization and prisonization. The system not only failed implemented but also broken the law as well.

These research try to find solution by privatization for the reason that prison which is run by private in many country more manageable than the government do. The methode in tesis researching is using analytical qualitative approach by observation, literature study, depth interviews with the stakeholders and done some focused group discussion to practitioner and competent person. The aim is to ascertain how properness of prison privatization in Indonesia.

The research shows that prison privatization is very like fairness and proper do in Indonesia. For argumentation, UU No. 12/1995 is compatible with privatization. In (act. 2) the guidelines that convict or prisoner have right to active in nation building productively and (act. 4), in explicit they refers to get wages for their works. In order that prison privatization will become realization, the Directorate General of Correction in the ministry should form a task force and make the base law. Only in this division, privatization can be implemented in 5 years ahead. If so, it become a breakthrough, the big one in Indonesian prison history. Directorate General of Correction Department of Law and Human Right required to have a great public relation strategy not only in making opinion but also pushing the government. For its reason, if there is no authority political will, no prison privatization in these Republic either.

Keywords:
Privatization, correction, overcrowding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Signifikansi Penelitian	11
1.6. Batasan Penelitian	11
1.7. Pembabakan Penulisan	12
2. KAJIAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Pustaka	16
2.2. Kerangka Konsep	16
2.3. Kerangka Teori	20
3. METODE PENELITIAN	32
3.1. Metode Penelitian	32
3.2. Teknik Pengumpulan Data	33
3.3. Analisis Data	36
3.4. Hambatan Penelitian	38
4. SEJARAH, VISI DAN MISI PEMASYARAKATAN.....	39
4.1. Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia	39
4.2. Konsepsi, Visi dan Misi	46
4.3. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan	46
4.4. Keadaan Fisik Lapas Cipinang	48
4.5. Kondisi Penghuni	50
4.6. Struktur Organisasi	54
4.7. Sistem Penempatan Penghuni	56
4.8. Tata Kehidupan	57
4.9. Epilog	58

5.	SEJARAH DAN PELAKSANAAN	
	PRIVATISASI LAPAS	60
5.1.	Sejarah Privatisasi	60
5.2.	Sejarah Privatisasi Penjara	62
5.3.	Privatisasi Penjara di Berbagai Negara	63
5.4.	Bukti Penghematan Biaya Konstruksi.....	74
5.5.	Bukti Penghematan di Sektor Manajemen	75
5.6.	Fakta dan Statistik Terkini	78
5.7.	Epilog	79
6.	HASIL PENELITIAN	82
6.1.	Hasil Wawancara	82
6.2.	Hasil Focused Group Discussion	98
6.3.	Epilog	107
7.	ANALISIS	109
7.1.	Agenda Kebijakan	109
7.2.	Formulasi Kebijakan	109
7.3.	Adopsi Kebijakan	111
7.4.	Implementasi Kebijakan	112
7.5.	Evaluasi Kebijakan	112
7.6.	Privatisasi Sebagai Solusi	113
7.7.	Hambatan Privatisasi	115
7.8.	Produktif dan Profit Oriented	116
7.9.	Landasan Hukum	117
8.	PENUTUP	120
8.1.	Kesimpulan	120
8.2.	Saran	122
	DAFTAR REFERENSI	124
	LAMPIRAN	130
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	159

DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

TABEL

Tabel 1	Data Hunian Rutan dan Lapas Secara Nasional	2
Tabel 2	Jumlah Rata-Rata OT & OH Tahun 2008	51
Tabel 3	Jumlah Rata-Rata OT & OH Tahun 2007	52
Tabel 4	Jumlah Rata-Rata OT & OH Tahun 2006	53
Tabel 5	Keunggulan Lembaga Koreksi Yang Dikelola Swasta	78
Tabel 6	Perbandingan Pelaksanaan Lembaga Koreksi	79

GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Kebijakan Publik	12
Gambar 2	Tahapan Penelitian	32
Gambar 3	Siklus Kebijakan	37
Gambar 4	Struktur Organisasi Lapas Cipinang	55

GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Rata-Rata OT & OH Tahun 2008	51
Grafik 2	Jumlah Rata-Rata OT & OH Tahun 2007	52
Grafik 3	Jumlah Rata-Rata OT & OH Tahun 2006	53
Grafik 4	Pertumbuhan Napi LP Swasta di Dunia	77
Grafik 5	Pertumbuhan Napi LP Swasta di Amerika	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	130
Lampiran 2 Petikan Lengkap Wawancara dengan Narasumber	133
Lampiran 3 Foto Pelaksanaan Focused Group Discussion	151
Lampiran 4 Petikan Lengkap Hasil FGD.....	152

